

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH  
DAN FAKTOR AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)

**Skripsi**

**Untuk memenuhi Sebagai persyaratan**

**Mencapai derajat Sarjana S1**

**Program Studi Akuntansi**



**Disusun oleh:**

**Kartika Ratri Kusumasari**

**NIM : 31401506009**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG**

**2020**

Skripsi

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN  
FAKTOR AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH**

(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)

Disusun oleh:

**Kartika Ratri Kusumasari**

**NIM: 31401506009**

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya  
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian penelitian skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung

**UNISSULA**

جامعتنا سلطان أبو تراب الإسلامية

Semarang, 19 Agustus 2020

Pembimbing

**Dr.Hj.Indri Kartika, SE, M.Si., Akt., CA**

**NIK. 211490002**

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN  
FAKTOR AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH**

(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)

**Disusun Oleh:**

**Kartika Ratri Kusumasari**

**Nim : 31401506009**

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada 6 Oktober 2020

**Susunan Dewan Penguji**

Pembimbing

Penguji I

  
**Dr. Hj. Indri Kartika, S.E., M.Si., Akt.**

**NIK 211490002**

  
**Dr. H. Kiryanto, SE., M.si.**

**NIK 211406018**

Penguji II

  
**Dr. Zainal Alim Adiwijaya, S.E, M.Si**

**NIK 221492005**

Skripsi ini telah diterima sebagai persyaratan  
untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Tanggal 6 Oktober 2020

Ketua Program Studi Akuntansi



**Dr. Dra. Winarsih, SE., M.Si.**

**NIK.211415029**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kartika Ratri Kusumasari

NIM : 31401506009

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa usulan penelitian skripsi berjudul **“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Faktor Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiast atau duplikasi dari karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam usulan penelitian skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiast dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang tersedia.

Semarang, 19 Agustus 2020

Yang Menyatakan

Kartika Ratri Kusumasari



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kartika Ratri Kusumasari  
NIM : 31401506009  
Program Studi : S1 Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung  
Alamat Asal : Ds. Kutosari, RT 01/05, Kec. Gringsing, Kab. Batang  
No. Hp/Email : 082137437190/ [kartikaratri20@gmail.com](mailto:kartikaratri20@gmail.com)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Faktor Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”**. Menyetujui menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan hak bebas royalti non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dipublikasikan di internet, dan media lain untuk kepentingan akademik selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta atau plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 Agustus 2020

Yang Menyatakan

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”*

*(QS. Al Insyirah 5-6)*

*“Tubuh dan Seluruh organ tubuh yang kita miliki hanya memiliki hak pakai saja, jadi jika sakit berobatlah, jika lelah istirahatlah dan jika sedih menangislah. Jangan lupa bersyukur”*

### PERSEMBAHAN

Kusembahkan karya sederhana ini kepada kedua orang tua saya, kepada orang-orang terdekat saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam setiap langkah dan waktu dan juga untuk diri saya sendiri yang sudah berjuang dan tidak menyerah. Terima kasih. You did well!!.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Faktor Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Penulis menyadari bahwa selama penyusunan pra skripsi ini banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Dr. Hj. Indri Kartika, SE, M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan cermat dan memberi masukan sehingga penelitian yang dilakukan membuahkan hasil maksimal.
4. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Kedua orang tua saya atas semua doa-doa yang tiada henti, kasih sayang, semangat dan motivasi yang terus menerus, yang tidak ternilai harganya.

6. Teman-teman selama kuliah terutama Jilan, Jalin, Rinda, Febby dan Lelly yang telah memberikan semangat ketika saya sedang berada dititik jenuh.
7. Terima Kasih Pankreas yang selama ini terus mendukung dan terus berada di sisi saya disaat yang sulit.
8. Terima Kasih kepada playlist sportify yang selalu memutar lagu-lagu favorit saya.
9. Terima Kasih Super Junior yang sudah menghibur saya dengan konten-konten yang menghibur sehingga saya mampu melewati semuanya.
10. Terima Kasih kepada diri saya sendiri karena bisa melewati masa-masa sulit. You did well!
11. Penguji yang telah memberi saran terkait penelitian ini, sehingga terhindar dari kesalahan penulisan maupun kesalahan penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan. Namun besar harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi para pembaca sekalian.

Semarang, 19 Agustus 2020

Penulis

**Kartika Ratri Kusumasari**

**NIM: 31401506009**



## DAFTAR ISI

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN FAKTOR AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	i
Skripsi.....	ii
PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN FAKTOR AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
INTISARI.....	xx
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.1 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Bagi Teoritis.....	8
1.4.2 Bagi Praktisi.....	9
BAB II.....	10
2.1 <i>Grand Theory</i> .....	10
2.2 Variabel-Variabel Penelitian.....	11
2.4.1 Kinerja Keuangan.....	11
2.2.2 Ukuran Pemerintah Daerah.....	13
2.2.3 Kemakmuran (Wealth).....	14
2.2.4 <i>Intergovernmental Revenue</i> .....	15
2.2.5 Belanja Modal.....	16
2.2.6 Temuan Audit.....	18

2.2.7 Opini Audit.....	19
2.3 Penelitian Terdahulu.....	20
2.4 Kerangka Penelitian Teoritis dan Pengembangan Hipotesis.....	29
2.4.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	29
2.4.2 Pengaruh Kemakmuran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	30
2.4.3 Pengaruh Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	31
2.4.4 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	32
2.4.5 Pengaruh Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	32
2.4.6 Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	33
2.5 Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III.....	36
3.5 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Populasi dan Sampel.....	36
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	37
3.5 Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	38
3.4.5 Variabel Dependen (Terikat).....	38
3.5.2 Variabel Independen.....	39
3.6 Teknik Analisis.....	44
3.6.1 Statistik Deskriptif.....	44
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	45
3.7 Pengujian Model Regresi.....	48
3.7.1 Analisis Regresi Linear Berganda.....	48
3.8 Pengujian Hipotesis.....	49
3.8.1 Uji Signifikan Simultan (Uji statistik F).....	49
3.8.2 Analisis Determinasi ( $R^2$ ).....	50
3.8.3 Uji signifikansi t (Uji Parsial).....	51
BAB IV.....	53
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1 Hasil Penelitian.....	53

4.1.1 Deskripsi Sampel.....	53
Tabel 4.1.....	53
Kriteria Sampel.....	53
Jumlah.....	53
Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah.....	53
35.....	53
Pemerintah Daerah Tidak Memiliki Data Lengkap.....	53
0.....	53
Pemerintah Daerah Tidak Memiliki Laporan Pemeriksaan BPK.....	53
0.....	53
Jumlah Sampel yang Memenuhi Kriteria.....	53
35.....	53
4.2 Analisis Data.....	54
4.2.1 Analisis Deskriptif.....	54
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	57
4.3.1 Uji Normalitas.....	57
4.3.2 Uji Multikolinieritas.....	58
4.3.3 Uji Autokorelasi.....	60
4.3.4 Uji Heterokedastisitas.....	61
4.4 Pengujian model regresi.....	62
4.5 Uji Hipotesis.....	63
4.5.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	63
4.5.2 Koefisien Determinasi.....	64
4.5.3 Uji Signifikansi t (uji Parsial).....	64
4.5 Pembahasan.....	68
BAB V.....	74
PENUTUP.....	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Keterbatasan.....	75
5.3 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	81



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Resume Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	41
Tabel 4.1 Sampel Penelitian.....	51
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	52
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas.....	55
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas.....	57
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi.....	58
Tabel 4.6 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	59
Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	60
Tabel 4.8 Hasil Uji F.....	61
Tabel 4.9 Hasil Koefisien Determinasi.....	62
Tabel 4.10 Hasil Uji t.....	62

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	34
Gambar 4.1 Uji Normalitas.....	56



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Daftar Sampel .....	79
LAMPIRAN 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	82
LAMPIRAN 3. Hasil Uji Normalitas.....	82
LAMPIRAN 4. Hasil Uji Multikolinieritas.....	83
LAMPIRAN 5. Hasil Uji Auto Korelasi.....	83
LAMPIRAN 6. Hasil Uji Heterokedastisitas.....	83
LAMPIRAN 7. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda.....	84
LAMPIRAN 8. Hasil Uji F.....	84
LAMPIRAN 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	84
LAMPIRAN 10. Hasil Uji t.....	85



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, belanja modal, *intergovernmental revenue*, temuan dan opini audit BPK pada kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, seluruh anggota populasi memenuhi syarat menjadi sample. Data sekunder diperoleh dari *website* Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Situs Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia dengan metode dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa, ukuran pemerintah daerah dan tingkat kemakmuran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, belanja modal dan *intergovernmental revenue* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara opini dan temuan audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

**Kata Kunci:** Karakteristik Pemerintah Daerah, Kinerja Keuangan, Faktor Audit



## **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the effect of local government size, wealth, capital expenditure, intergovernmental revenue, opinion, and BPK audit findings on the financial performance of regency/city in Central Java. Population of this research is all of regency/city in Central Java, data analysis technique used in this study is purposive sampling, all of the population was qualify to be samples. The data collection is done by observation on secondary data which is collected from official website Ministry of Internal Affairs of the Republic of Indonesia, Ministry of Internal Affairs of the Republic of Indonesia, and Audit Board of the Republic of Indonesia using the method of documentation. The result of the analysis showed that local government size and wealth have negative effect is insignificant on the financial performance, capital expenditure and intergovernmental revenue have positive significant effect on the financial performance. On the other hand, the variables opinion, and BPK audit findings positif effect is insignificant on the financial performance of the regencies/cities in Central Java.*

**Keywords:** *characteristic of local government, financial performance, factor audit*



## INTISARI

Penelitian ini menguji tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan faktor audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada penelitian ini digunakan 6 variabel yang diindikasikan mampu mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu ukuran pemerintah, kemakmuran, belanja modal, *intergovernmental revenue*, opini, dan temuan audit. *Grand Theory* yang digunakan adalah Teori Keagenan. Terdapat 6 hipotesis dalam penelitian ini, yaitu: a) ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah b) kemakmuran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah c) belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah d) *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah e) opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah f) temuan audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah periode 2015-2017 dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, seluruh anggota populasi memenuhi syarat menjadi sampel. Data sekunder diperoleh dari website resmi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan situs Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia dengan metode dokumentasi. Sampel pada penelitian adalah sebanyak 105 sampel. Dalam pengujian ini menggunakan teknik Analisis Regresi Linier Berganda dengan menggunakan SPSS 23.

Berdasarkan pengujian hipotesis dalam studi ini, dapat disimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah dan tingkat kemakmuran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, belanja modal dan *intergovernmental revenue* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, opini dan temuan audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia menganut asas desentralisasi dengan adanya otonomi daerah yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memberikan sebuah kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam kabupaten maupun kota, untuk mengurus daerahnya sendiri dengan baik dalam bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Konsekuensi adanya otonomi daerah yaitu harus disertai dengan peningkatan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah. Dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah seharusnya bisa dimanfaatkan sesuai dengan tujuan utama dana tersebut dan juga untuk meningkatkan infrastruktur, fasilitas, sarana dan prasarana publik yaitu dengan mengalokasikan penerimaan tersebut untuk meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan, misi atau visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi baik sektor swasta maupun publik yang dilakukan selama periode tertentu. Menurut Sularso dan Restanto (2011) Kinerja Keuangan

adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator tertentu. Peraturan Pasal 4 Nomor 105 Tahun 2000 mengatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan baik, maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Penyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan adanya evaluasi. Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dimaksudkan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berbeda dengan kinerja keuangan perusahaan. Selain berbasis anggaran, keuangan pemerintah daerah tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah ukuran pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah menunjukkan besar kecilnya suatu daerah (Kusumawardani, 2012). Ukuran pemerintah yang besar pada pemerintah daerah akan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik harus didukung dengan aset yang baik pula. Oleh karena itu, semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset, diharapkan bisa meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Selain ukuran pemerintah daerah, faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah kemakmuran. Kemakmuran merupakan kemampuan suatu daerah dalam mencukupi suatu kebutuhan (Putu dan Ni Made, 2016). Kemakmuran suatu daerah dapat dilihat dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada. PAD yang tinggi menunjukkan daerah mampu memanfaatkan potensi daerah yang ada dan bisa menandakan baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah.

*Intergovernmental revenue* dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan dan juga untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah daerah (Minarsih, 2015). Semakin besar dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah maka akan semakin ketat pengawasan yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan pengawasan yang ketat dapat mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan dana yang diterima dengan baik dan bisa meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah.

Belanja modal merupakan belanja pemerintah yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah (Ni Putu dan Ida, 2018). Salah satu kegiatan belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah adalah pembangunan infrastruktur umum. Pembangunan infrastruktur yang baik akan meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah yang berimplikasi pada peningkatan kinerja pemerintah.

Opini audit adalah sebuah pernyataan professional sebagai sebuah kesimpulan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (UU No.15 Tahun 2004). Opini audit digunakan untuk pertimbangan baik dan buruknya

kinerja pemerintah daerah. Oleh sebab itu semakin baik opini audit yang diberikan maka bisa menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik.

Temuan audit merupakan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK yang dapat menjadi tolok ukur kinerja keuangan pemerintah daerah (Endri dan Puji, 2017). Temuan audit dapat berupa kelemahan pengendalian internal, kecurangan, penyimpangan, dan ketidak atuhan terhadap perundang-undangan.. Semakin banyaknya temuan pelanggaran yang ditemukan dapat menggambarkan buruknya kinerja suatu daerah tersebut.

Beberapa penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah telah dilakukan sebelumnya, namun masih diperoleh hasil yang berbeda. Pada penelitian yang dilakukan Gita (2015), Putu & Ni Made (2016), Aziz (2016), Indah (2016) ditemukan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara pada Nur Ade & Kiswanto (2016) diperoleh hasil penelitian bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Variabel Kemakmuran diteliti oleh Gita (2015), Putu & Ni Made (2016), Ni Made & Eka (2016) diperoleh kemakmuran berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Surepno (2013) menyimpulkan bahwa kemakmuran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Gita (2015), Aziz (2016), Indah (2016) bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan hasil penelitian Ni Made & Eka (2016), Mulia, Hasan & M.Sahbri (2016) menunjukkan *intergovernmental revenue* berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dan penelitian Putu & Ni Made (2016) menunjukkan hasil bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh negative tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Ni Made & Eka (2016) menunjukkan hasil belanja modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara hasil penelitian Gina & Ida Bagus (2016) belanja modal berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut disangkal dengan penelitian Mulia, Hasan & M.Sahbri (2016) yang menyimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Nandhya & Lulus (2013) bahwa opini audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Putu & Ni Made (2016), Ni Made & Eka (2016), Endri & Puji (2016) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap keuangan pemerintah daerah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Putu & Ni Made (2016), Endri & Puji (2016) yang menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh negative tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pada penelitian Nur Ade &

Kiswanto (2016) menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda, hal tersebut memotivasi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, *intergovernmental revenue*, belanja modal, opini audit, temuan audit terhadap yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini terutama mengacu pada penelitian Putu & Ni Made (2016).

Perbedaan penelitian terletak pada: (1) Penambahan variabel belanja modal yang mengacu pada penelitian Ni Made dan Eka (2016). Belanja modal biasanya terkait dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. (2) Penelitian ini menggunakan sampel pemerintah daerah di provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2015-2017. Sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Putu & Ni Made (2016) menggunakan sampel pemerintah daerah Bali pada tahun 2008-2013.

### **1.1 Rumusan Masalah**

Pemerintah daerah dalam melakukan penyediaan layanan publik dan pencapaian pembangunan menjadi besar dikarenakan adanya otonomi daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya sistem pengendalian, evaluasi dan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur kemajuan yang dicapai. Kinerja keuangan dapat dijadikan sebagai pengendali organisasi yang diperkuat dengan menetapkan reward

dan punishment, sehingga pemerintah daerah akan bekerja dengan baik untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu ada beberapa faktor yang mungkin bisa mempengaruhi karakteristik pemerintah daerah dan faktor audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota?
2. Bagaimana pengaruh Kemakmuran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota?
3. Bagaimana pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota?
4. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota?
5. Bagaimana pengaruh Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota?
6. Bagaimana pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kemakmuran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
6. Untuk menguji dan menganalisis Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1.4.1 Bagi Teoritis**

1. Dapat berkontribusi dalam pengembangan teori dan pengetahuan akuntansi yang berfokus pada akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan faktor audit dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

### 1.4.2 Bagi Praktisi

Diharapkan bermanfaat untuk responden yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah sebagai gambaran mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan faktor audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Grand Theory*

#### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori yang mendasari penelitian mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan faktor audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah dijelaskan dengan perspektif teori keagenan. Teori Keagenan menggambarkan suatu hubungan keagenan antara *principal* dan *agent* yaitu, sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*) (Jesen dan Meckling, 1976). Dalam hubungan keagenan terdapat pemisah antara kepemilikan oleh *principal* dan *agent* sebagai pengendali, dalam suatu organisasi cenderung akan menimbulkan konflik keagenan. Menurut Meisser, et al., (2006:7) hubungan keagenan mengakibatkan dua permasalahan yaitu terjadinya asimetris informasi (*information asymmetry*), dan terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Teori Keagenan melihat bahwa adanya asimetris informasi dapat berdampak pada penyelewengan wewenang atau korupsi oleh pemerintah sebagai *agent*. Masalah ini menyebabkan adanya ketidakpercayaan masyarakat sebagai *participal* terhadap *agent* atau pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah sebagai *agent* memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan memberikan pertanggungjawaban kepada pihak *participal* atau masyarakat. Pengelolaan

pemerintah juga harus diawasi untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu bentuk pengawasan ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Negara, Negara sebagai *participal* menunjuk BPK sebagai pemeriksa laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah maka informasi yang akan diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah sehingga adanya asimetris informasi yang terjadi menjadi lebih berkurang, maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil.

Di Indonesia dibentuk satu badan unit pengawasan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pengauditan terhadap seluruh pemerintah daerah di Indonesia. BPK melakukan pemeriksaan terhadap keuangan, pemeriksaan kinerja dan lainnya, dengan hasil berupa opini audit, temuan audit, kesimpulan, dan juga dalam bentuk rekomendasi.

## **2.2 Variabel-Variabel Penelitian**

### **2.4.1 Kinerja Keuangan**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 kinerja keuangan digunakan untuk memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas), untuk memenuhi kewajiban jangka pendek (likuiditas),

memenuhi semua kewajibannya (solvabilitas) dan kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang telah ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Indah, 2016).

Menurut Bastian (2010) kinerja keuangan dapat didefinisikan sebagai prestasi yang telah dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan kinerja keuangan daerah adalah suatu pencapaian yang telah direncanakan oleh suatu daerah untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang dinilai melalui aspek keuangan yang telah disusun dalam sebuah laporan keuangan oleh pemerintah daerah.

Menurut Chaw (dalam Sumarjo, 2010) kinerja keuangan merupakan komponen yang penting, untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Data pengukuran kinerja keuangan yang bersumber dari informasi finansial yang diukur berdasarkan pada anggaran yang sudah dibuat dapat menjadi peningkatan untuk program selanjutnya untuk meningkatkan pelayanan publik agar lebih baik.

Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dari kemampuan pemerintah daerah dalam menggali berbagai potensi yang dimiliki oleh daerahnya sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Menurut

Ni Made dan Eka (2016) kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio kemandirian, ekonomis, efektivitas, dan efisiensi. Salah satu alat untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian kinerja keuangan pemerintah daerah ini ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya karakteristik daerah berupa ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, *intergovernment revenue*, dan belanja modal, serta beberapa faktor audit berupa opini audit dan temuan audit.

### 2.2.2 Ukuran Pemerintah Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online ukuran adalah hasil ukur yang menunjukkan besaran ukuran suatu benda yaitu panjang, besar, luas, atau besaran tertentu. Menurut Kusumawardani (2012) ukuran adalah suatu nominal yang dapat mendeskripsikan sesuatu. Ukuran pemerintah menunjukkan besar kecilnya pemerintah tersebut. Menurut Syafitri (2012) ukuran organisasi menunjukkan seberapa besarnya suatu organisasi tersebut. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran yang besar dituntut untuk melakukan transparansi atas pengelolaan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas publik melalui pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Gita (2015) menyatakan pemerintah yang memiliki ukuran yang besar akan dituntut untuk memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan daerah dengan ukuran kecil.

Menurut Putu dan Ni Made (2016) *size* yang besar pada pemerintah daerah akan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan maupun program pemerintah dalam melayani masyarakat. Putu dan Ni Made (2016) menyatakan ukuran dapat diukur dengan cara, antara lain jumlah karyawan, total aset, total pendapatan, dan tingkat produksi. Menurut Indah (2016) ukuran pemerintah daerah diukur melalui total aset. Total aset dipilih karena nilainya lebih stabil daripada jumlah pendapatan dan jumlah pegawai.

### 2.2.3 Kemakmuran (Wealth)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, kemakmuran adalah semua harta milik dan kekayaan yang dimiliki Negara untuk keperluan seluruh rakyat. Menurut Putu dan Ni Made (2016) kemakmuran adalah suatu kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Jadi definisi kemakmuran daerah secara umum bisa diartikan kemampuan masing-masing daerah untuk mencukupi kebutuhan daerahnya dengan memanfaatkan pendapatan yang didapatkan oleh daerah.

Menurut undang-undang No. 23 Tahun 2014, Pendapatan Daerah merupakan semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Besarnya PAD dapat menunjukkan jika daerah mampu mendayagunakan sumber daya alam dan potensi yang ada. Menurut Putu dan Ni Made (2016) pertumbuhan PAD yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya yang optimal dengan menggali sumber-

sumber PAD yang ada di daerahnya. Tingkat kemakmuran tentunya akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan public sebagai bukti peningkatan kinerja pemerintah daerah. Menurut Gita (2015) kemakmuran pemerintah dapat diukur dengan menggunakan jumlah PAD. Semakin tinggi PAD menandakan semakin bagus kinerja pemerintah daerah. Menurut Hafidh dan Siddiq (2013) kemakmuran pemerintah daerah juga dapat diukur dengan cara membandingkan PAD dengan total pendapatan.

#### **2.2.4 Intergovernmental Revenue**

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Suhardjanto et al. (2010) *intergovernmental revenue* biasa dikenal sebagai dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan hasil dari kebijakan pemerintah pusat berupa Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut Minarsih (2015) dana perimbangan juga dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai pembangunan, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pemerintah pusat dan daerah dalam hal ketimpangan dan juga untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan daerah. Jadi dapat disimpulkan *intergovernmental revenue* adalah suatu pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, guna untuk

dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan.

Dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat akan masuk dalam akun pendapatan daerah sehingga meningkatkan total penerimaan daerah, sebagai sumber dana pengelolaan daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan pada pemerintah daerah akan dipantau oleh pemerintah pusat. Semakin besar dana perimbangan bagi suatu daerah maka akan semakin ketat pengawasan yang akan diberikan pemerintah pusat. Dengan demikian hal ini akan mendorong pemerintah daerah bekerja dengan baik untuk bisa meningkatkan kinerja sebagai bentuk pengelolaan keuangan yang telah diberikan pemerintah pusat. Jadi semakin besar dana perimbangan yang diberikan maka membuat kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin baik.

Menurut Aziz (2016) *intergovernmental revenue* dapat diukur dengan perbandingan antara total dana perimbangan dengan total pendapatan. Pengukuran ini dipilih karena *intergovernmental revenue* merupakan bagian dari pendapatan daerah yang berasal dari lingkungan eksternal dan besarnya ketergantungan pemerintah daerah dengan transfer pemerintah pusat.

### **2.2.5 Belanja Modal**

Menurut Peraturan Daerah Pemerintah Dalam Negeri No 33 Tahun 2017, penganggaran belanja modal dapat digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan

dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset. Menurut Ni Made dan Eka (2016) belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan selama lebih dari satu tahun anggaran serta dapat menambah kekayaan atau aset daerah. Mohammed et al (2015) juga menyatakan bahwa belanja modal adalah salah satu kegiatan belanja pemerintah daerah yang dapat meningkatkan aktiva tetap dan dapat memberikan manfaat dalam jangka waktu panjang.

Yulia dan Mimba (2016) mengatakan bahwa pengalokasian dana pada belanja modal akan dapat membantu daerah untuk memperoleh sumber keuangan untuk menghasilkan pendapatan daerah, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Kegiatan belanja modal bisa dikatakan sebagai kegiatan investasi pemerintah daerah, namun dalam hal ini belanja modal pada pemerintah daerah tidak bertujuan untuk mencari profit (Ni Putu dan Ida, 2018). Alokasi belanja modal pada pemerintah daerah dapat bersumber dari pendapatan dan pembiayaan. Sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan yang sah lainnya. Belanja modal dapat digunakan dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan, seperti pembangunan infrastruktur, pembelian tanah, peralatan dan mesin, gedung, jalan, dan aset tetap lainnya. Pembangunan infrastruktur daerah merupakan salah satu kegiatan pengeluaran modal yang diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kinerja keuangan daerah. Menurut Ni Made dan Eka (2016) belanja

modal dapat diukur dengan membandingkan belanja modal dengan total belanja daerah.

### 2.2.6 Temuan Audit

Menurut Pedoman Penyusunan Kertas Data Audit, setiap temuan hendaknya memuat tanggapan dari auditi, sehingga terjadi kesamaan informasi (*balancing information*) terhadap informasi temuan yang disajikan oleh auditor. Tanggapan yang diuraikan dalam temuan audit adalah berupa tanggapan yang diberikan secara tertulis bersama antara tim audit dan auditi dalam pembicaraan temuan. Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas temuan audit dibagi menjadi dua, yaitu temuan atas kelemahan SPI dan temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan atas SPI terbagi menjadi tiga kelompok temuan, yaitu kelemahan system pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pelaksanaan APBD, dan kelemahan struktur pengendalian umum.

Menurut Nandhya dan Lulus (2016) temuan audit BPK adalah hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang mengungkapkan adanya kelemahan sistem pengendalian internal. Menurut Hafidh dan Shiddiq (2013) temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut peraturan BPK Nomor 1 tahun 2017 tentang standar pemeriksaan keuangan Negara menyatakan bahwa temuan pemeriksaan dapat berupa kelemahan pengendalian internal, kecurangan, penyimpangan, atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpotensi merugikan Negara. Dengan demikian, temuan pemeriksaan BPK dapat menjadi tolak ukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut Endri dan Puji (2017) temuan pemeriksaan dapat diukur dengan menggunakan nilai temuan yang terdapat pada laporan hasil pemeriksaan BPK.

### **2.2.7 Opini Audit**

Menurut Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017 opini audit adalah pemeriksaan dengan memberikan kesimpulan atas tujuan pemeriksaan, khusus pemeriksaan keuangan, pemeriksa menyatakan kesimpulan dalam bentuk opini. Menurut Putu & Ni Made (2016) opini audit merupakan pernyataan profesional sebagai sebuah kesimpulan yang dikeluarkan oleh pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Sesuai dengan Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017 pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan tujuan memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan Negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut. Oleh karena itu hasil pemeriksaan BPK berupa opini audit merupakan hal yang sangat penting sebagai alat ukur penilaian kinerja pengelolaan keuangan.

Setyowati (2013) juga berpendapat bahwa kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat diketahui dari opini audit, sehingga sebagai pertimbangan baik dan buruknya kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari opini audit yang ada. Dengan kata lain, semakin baik opini audit BPK maka seharusnya dapat menunjukkan semakin membaiknya kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut standar audit, ada empat jenis opini sesuai dengan tingkat kewajarannya, yaitu: wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), dan tidak memberikan pendapat (TMP).

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan faktor audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ditunjukkan pada table berikut:

**Tabel 2.1**  
**Resume penelitian terdahulu**

No.	Peneliti (Tahun)	Variabel	Alat Ukur	Hasil Penelitian
1.	Putu Riesty Masdiantini dan Ni Made Adi Erawati (2016)	<p><b>Dependen:</b> Kinerja Keuangan</p> <p><b>Independen:</b> Ukuran Pemerintah, Kemakmuran, <i>Intergovernmental Revenue</i>, Temuan</p>	Analisis regresi linier berganda	<p>1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali.</p> <p>2. Kemakmuran berpengaruh</p>

		Audit, dan Opini Audit		<p>positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali.</p> <p>3. <i>Intergovernmental revenue</i> berpengaruh negative tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali.</p> <p>4. Temuan audit BPK berpengaruh negative tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali.</p> <p>5. Opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali.</p>
2.	Ni Made Suryaningsih dan Eka Ardhani Sisdyani (2016)	<p><b>Dependen:</b></p> <p>Kinerja Keuangan</p> <p><b>Independen:</b></p> <p>Kemakmuran pemerintah daerah,</p>	Analisis regresi linier berganda	<p>1. Kemakmuran berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>2. Status daerah berpengaruh</p>

		Status daerah, Tingkat ketergantungan, Belanja Modal, dan Opini audit		<p>negative tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>3. Ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>4. Belanja modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>5. Opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
3.	Gita Maiyora (2015)	<p><b>Dependen:</b> Kinerja keuangan</p> <p><b>Independen:</b> Ukuran pemerintah daerah, Kemakmuran, Ukuran legislative, Leverage, dan <i>Intergovernemntal revenue.</i></p>	Analisis regresi linier berganda	<p>1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>2. Kemakmuran pemerintah daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>3. Ukuran legislative pemerintah daerah berpengaruh</p>

				<p>negative tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>4. Leverage pemerintah daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>5. <i>Intergovernmental revenue</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
4.	Ni Putu Gina Sukma Antari dan Ida Bagus Panji Sedana (2018)	<p><b>Dependen:</b> Kinerja Keuangan</p> <p><b>Independen:</b> Pendapatan asli daerah dan Belanja Modal</p>	Analisis regresi linier berganda	<p>1. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Bali.</p> <p>2. Belanja Modal berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Bali.</p>
5.	Endri Parwanto dan Puji Harto	<p><b>Dependen:</b> Kinerja keuangan</p>	Partial Leasy Square	<p>1. Opini pemeriksaan berpengaruh positif signifikan</p>

	(2017)	<p><b>Independen:</b></p> <p>Opini pemeriksaan, Temuan pemeriksaan, Tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP), Ketepatan waktu</p>		<p>terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>2. Temuan pemeriksaan BPK berpengaruh negative tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>3. Tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>4. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
6.	Asmaul Aziz (2016)	<p><b>Dependen:</b></p> <p>Kinerja keuangan</p> <p><b>Independen:</b></p> <p>Ukuran pemerintah daerah, <i>Intergovernmental revenue</i>, dan Belanja Daerah</p>	<p>Analisis regresi linier berganda</p>	<p>1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>2. <i>Intergovernmental revenue</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>

				3. Belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
7.	Indah Puspa Sari (2016)	<p><b>Dependen:</b> Kinerja keuangan</p> <p><b>Independen:</b> Ukuran pemerintah daerah, PAD, Leverage, Dana perimbangan, dan Ukuran legislative</p>	Analisis regresi linier berganda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</li> <li>2. PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</li> <li>3. Leverage berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</li> <li>4. Dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</li> <li>5. Ukuran legislative berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</li> </ol>
8.	Mulia Andirfa,	<b>Dependen:</b>	Regresi linier	1. Belanja modal berpengaruh

	Hasan Basri, M.Shabri A.Majid (2016)	Kinerja Keuangan  <b>Independen:</b>  Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan PAD	berganda	terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 2. Dana perimbangan secara parsial berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 3. Pendapatan asli daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
9.	Nandhya Marfiana dan Lulus Kurniasih (2013)	<b>Dependen:</b> Kinerja Keuangan  <b>Independen:</b> Ukuran Pemerintah daerah, Tingkat Kekayaan, Tingkat Ketergantungan, Belanja Daerah, Ukuran Legislatif, Temuan Audit, dan Opini Audit	Analisis regresi linier berganda	1. Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 2. Tingkat kekayaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 3. Tingkat ketergantungan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 4. Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

				<p>pemerintah daerah.</p> <p>5. Ukuran legislative berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>6. Temuan audit berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>7. Opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
10.	Nur Ade Noviyanti dan Kiswanto (2016)	<p><b>Dependen:</b> Kinerja Keuangan</p> <p><b>Independen:</b> Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Belanja Daerah, Ukuran Legislatif, dan Temuan Audit</p>	Analisis regresi linier berganda	<p>1. Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>2. Tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>3. Tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>4. Belanja daerah</p>

				<p>berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>5. Ukuran legislative berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>6. Temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
11.	Surepno (2013)	<p><b>Dependen:</b> Kinerja Keuangan</p> <p><b>Independen:</b> Pengaruh <i>Return On Equity</i> (ROE), Ukuran, dan Kemakmuran</p>	Analisis regresi linier berganda	<p>1. ROE berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>2. Ukuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>3. Kemakmuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>

Sumber : Hasil Penelitian

Penelitian ini mengacu pada penelitian Putu dan Ni Made (2016) dengan perbedaan adalah berupa penambahan variabel belanja modal. Menurut Peraturan Daerah Dalam Negeri No. 33 Tahun 2017 belanja modal dapat digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset

lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, digunakan dalam pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset. Penambahan variabel belanja modal diperkuat melalui penelitian yang dilakukan oleh Ni Made dan Eka (2016). Penambahan variabel karena pengalokasian dana pada belanja modal akan dapat membantu daerah untuk mendapatkan pendapatan daerah, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

## **2.4 Kerangka Penelitian Teoritis dan Pengembangan Hipotesis**

### **2.4.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Ukuran pemerintah daerah adalah salah satu variabel yang mengukur besar dan kecilnya pemerintahan suatu daerah. Ukuran yang besar pada pemerintah daerah akan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan maupun program pemerintah dalam pelayanan masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik, harus didukung dengan aset yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semakin besar ukuran daerah yang bisa ditandai dengan besarnya besar jumlah aset pemerintah daerah, maka diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Riesty (2016), Gita (2015), Aziz (2016), dan Indah (2016) menemukan bahwa adanya pengaruh positif signifikan antara ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin banyak pendapatan suatu daerah maka

menggambarkan jika daerah tersebut semakin produktif kinerja pemerintah tersebut. Atas dasar kajian teoritis dan penelitian terdahulu maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H1 : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

#### **2.4.2 Pengaruh Kemakmuran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah**

##### **Daerah**

Kemakmuran adalah suatu kemampuan dalam mencukupi suatu kebutuhan. Kemakmuran pemerintah dapat dinyatakan dengan melihat jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD sendiri merupakan kekayaan riil dari masing-masing daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya. Besarnya PAD dapat menunjukkan jika daerah mampu memanfaatkan sumber daya alam dan potensi yang ada. Semakin tinggi PAD dapat menandakan semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingkat kemakmuran dapat berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang mengakibatkan pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Putu riesty, suryaningsih dan gita dalam penelitiannya menemukan bahwa kemakmuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut dikarenakan masih besarnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana dari pemerintah pusat. Atas dasar kajian teoritis dan penelitian terdahulu dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H2 : Kemakmuran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan  
Pemerintah Daerah

### **2.4.3 Pengaruh Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

*Intergovernmental* revenue diartikan sebagai salah satu pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat atau biasa disebut dengan dana perimbangan. Dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat yang diterima pemerintah daerah akan meningkatkan total penerimaan daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Semakin besar dana perimbangan yang diterima maka akan semakin ketat pengawasan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dengan pengawasan yang ketat dapat mendorong pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan kualitas kinerja. Semakin besar dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat maka membuat kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

Pada penelitian Gita (2015) dan Aziz (2016) menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Atas dasar kajian teoritis dan penelitian terdahulu dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H3 : *Intergovernmental revenue* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja  
keuangan pemerintah daerah

#### **2.4.4 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah**

##### **Daerah**

Belanja modal merupakan sebuah pengeluaran pemerintah daerah yang dapat meningkatkan aktiva dan dapat dimanfaatkan dalam waktu yang panjang. Pembangunan infrastruktur umum adalah salah satu kegiatan belanja modal yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah. Pengalokasian belanja modal ini dapat membantu daerah untuk memperoleh sumber keuangan yang dapat menghasilkan pendapatan daerah, yang dapat berimplikasi pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Mulia, Hasan, dan M. Shabri (2016) menyatakan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Semakin pemerintah daerah meningkatkan alokasi belanja modal, maka akan semakin tinggi kinerja keuangan daerah. Atas dasar kajian teoritis dan penelitian terdahulu dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H4 : Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

#### **2.4.5 Pengaruh Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah**

##### **Daerah**

Temuan audit merupakan kasus yang ditemukan BPK mengenai sebuah laporan keuangan suatu pemerintahan daerah atas pelanggaran yang dilakukan

terhadap sistem pengendalian intern atau mengenai peraturan perundang-undang yang berlaku. Semakin banyaknya temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah menggambarkan semakin buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Dengan demikian, temuan audit berupa hasil pemeriksaan BPK bisa menjadi tolok ukur untuk melihat kinerja keuangan pemerintah daerah apakah pemerintahan tersebut telah bekerja dengan baik tanpa adanya kecurangan dan pelanggaran.

Putu Riesty dan Endri menyatakan temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal itu menunjukkan jika semakin banyak temuan audit yang dilakukan oleh pemerintah daerah maka menggambarkan semakin buruknya kinerja. Atas dasar kajian teoritis dan penelitian terdahulu dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H5 : Temuan audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

#### **2.4.6 Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Opini audit merupakan sebuah pernyataan sebagai kesimpulan dalam sebuah pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi dalam sebuah laporan keuangan yang disajikan dengan memberikan keyakinan bahwa informasi yang diberikan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. BPK melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan opini audit, sehingga dapat digunakan untuk pertimbangan baik dan buruknya kinerja pemerintah daerah. Opini audit merupakan hal penting yang bisa digunakan untuk alat ukur

penilaian kinerja. Semakin baik opini audit BPK maka akan semakin menunjukkan baiknya kinerja pemerintah daerah tersebut.

Riesty (2016), Ni Made dan Eka (2016), dan Endri (2017) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Jadi, opini audit dijadikan sebagai sebuah alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Atas dasar kajian teoritis dan penelitian terdahulu maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H6 : Opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

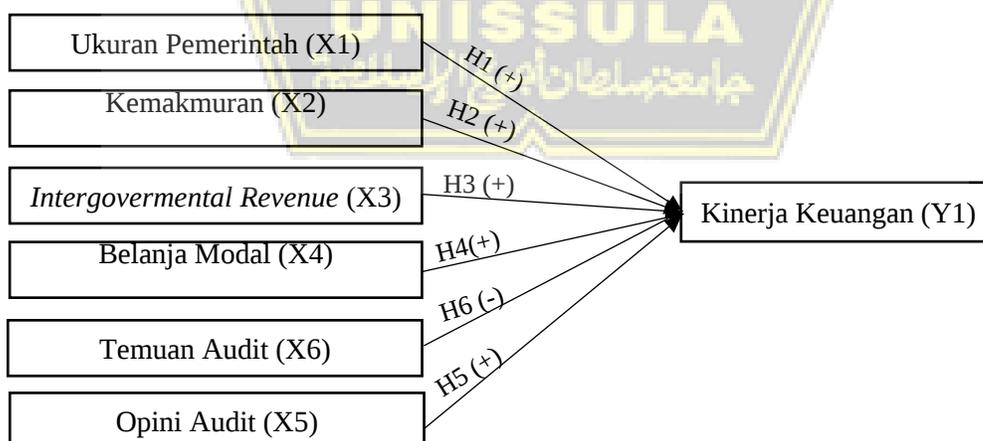
## 2.5 Kerangka Pemikiran

Didalam hubungan pemerintahan dengan masyarakat terdapat hubungan antara *agent* dan *principal*. Dalam hubungan tersebut pemerintah sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal* dapat timbul ketidak harmonisan yang dapat mengakibatkan timbulnya masalah. Masalah yang sering terjadi diantara hubungan *agent* dan *principal* adalah adanya asimetri informasi yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah salah satunya adalah ukuran pemerintah. Besar dan kecilnya ukuran pemerintah dapat dilihat dari besarnya aset. Apabila pemerintah mampu memaksimalkan penggunaan aset yang dimiliki maka kinerja keuangan pemerintah juga semakin baik. Selanjutnya tingkat kemakmuran suatu daerah juga dijadikan pertimbangan untuk melihat kinerja

keuangan pemerintah daerah tersebut. Semakin tinggi PAD maka dapat menandakan semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah. Jika pemerintah mampu memanfaatkan dengan baik dana perimbangan atau *intergovernmental revenue* yang diberikan oleh pemerintah pusat maka akan bisa menjadikan kinerja keuangan pemerintah tersebut semakin baik. Semakin tinggi pengalokasian belanja modal suatu daerah dalam pembangunan infrastruktur publik dapat mengindikasikan semakin baik kinerja pemerintah daerah. Jika jumlah temuan audit suatu daerah terdeteksi sedikit maka akan semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah tersebut dan sebaliknya jika temuan audit yang ditemukan banyak maka semakin buruk pula kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Semakin baik opini audit yang diterima oleh pemerintah daerah dapat menunjukkan baiknya kinerja pemerintah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka pemikiran teoritis dapat disusun sebagai berikut :



**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.5 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro, 2016:12)

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono,2017:80). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki data laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan pada tahun 2015-2017. Alasan memilih Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah adalah karena Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang luas dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, perekonomian di provinsi Jawa Tengah menyumbang 8,74 % terhadap perekonomian nasional dan provinsi Jawa Tengah berada di posisi ke-4 penyumbang perekonomian terbesar. Menurut Sugiono (2017:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode sensus yaitu

dimana objek penelitian adalah seluruh populasi yaitu seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Adapun kriteria objek penelitian adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki data laporan keuangan yang lengkap dan laporan hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2015-2017.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data penelitian ini berupa data-data yang sekunder. Data sekunder adalah sumber yang data tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017:137). Data sekunder meliputi data tentang laporan keuangan Pemda dan laporan keuangan yang sudah diaudit BPK. Sumber data berasal dari *website* Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Situs Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2017:329). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengakses dan mengunduh laporan keuangan tahun 2015-2017, yang diperoleh dari *website* Kementerian Keuangan yaitu

[www.dpjk.depkeu.go.id](http://www.dpjk.depkeu.go.id), dan Situs Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yaitu [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id).

### 3.5 Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, variabel yang diteliti dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas).

#### 3.4.5 Variabel Dependen (Terikat)

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017:59). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Menurut Indah (2016) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkatan pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang telah ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Kinerja Keuangan pemerintah daerah diukur dengan rasio efisiensi (Indah, 2016). Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Aziz, 2016). Rasio efisiensi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Pengeluaran}}{\text{Total Realisaisi Penerimaan}}$$

(Aziz, 2016)

### 3.5.2 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2017:59) variabel. Dalam penelitian ini variabel dependen terdiri dari ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, *intergovernmental revenue*, belanja modal, opini audit dan temuan audit.

#### 3.5.2.1 Ukuran Pemerintah Daerahs

Ukuran pemerintah daerah menurut Kusumawardani (2012) adalah ukuran nominal yang dapat mendeskripsikan sesuatu, ukuran pemerintah menunjukkan besar kecilnya pemerintahan tersebut. Dalam penelitian ini variabel ukuran pemerintah daerah diukur dengan menggunakan Ln (Total Aset). Total asset dapat diperoleh didalam laporan Neraca daerah (Indah, 2016). Ukuran pemerintah daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Ukuran\ Pemerintah\ Daerah = \ln(Total\ Aset)$$

(Indah, 2016)

#### 3.5.2.2 Kemakmuran

Kemakmuran dalam penelitian ini diproyeksikan dengan pendapatan Asli Daerah sebab semua penerimaan daerah berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Dalam penelitian ini kemakmuran diukur dengan menggunakan PAD dibandingkan dengan total pendapatan (Hafidh dan Shiddiq, 2013). Kemakmuran dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kemakmuran} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$$

(Hafidh dan Shiddiq, 2013)

### 3.5.2.3 Intergovernmental Revenue

Menurut Minarsih (2015) dana perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai pembangunan dan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini variabel *intergovernmental revenue* diukur dengan cara membandingkan total dana perimbangan dengan total pendapatan (Aziz, 2016). *Intergovernmental revenue* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Intergovernmental Revenue} = \frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}}$$

(Aziz, 2016)

### 3.5.2.4 Belanja Modal

Menurut Ni Made dan Eka (2016) belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan selama lebih dari satu tahun anggaran serta menambah kekayaan atau asset daerah. Dalam penelitian ini variabel belanja modal dapat diukur dengan membandingkan belanja modal dengan total belanja daerah (Ni Made dan Eka, 2016), dengan rumus sebagai berikut:

$$Belanja Modal = \frac{Belanja Modal}{Total Belanja Daerah}$$

(Ni Made dan Eka, 2016)

### 3.5.2.5 Temuan Audit

Temuan audit menurut Hafidh dan Shiddiq (2013) adalah kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Rentang jumlah temuan kasus untuk menentukan klasifikasi banyak atau sedikitnya temuan audit dalam penelitian adalah dengan menggunakan nilai rata-rata temuan kasus kelemahan SPI di seluruh pemerintah daerah sampel. Dalam penelitian ini temuan audit diukur dengan menggunakan skala 3 poin yaitu dengan melihat jika rentang jumlah temuan lebih banyak maka nilai 1, jika rentang jumlah temuan sama dengan nilai rata-rata maka klasifikasi temuan sedang maka nilai 2, dan jika rentang jumlah temuan lebih kecil dari nilai rata-rata maka dikatakan memiliki klasifikasi sedikit maka diberi nilai 3. (putu dan nimade)

### 3.5.2.6 Opini Audit

Menurut Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017 opini audit adalah pemeriksaan dengan memberikan kesimpulan atas tujuan pemeriksaan, khusus pemeriksaan keuangan, pemeriksa menyatakan kesimpulan dalam bentuk opini. Dalam penelitian ini opini audit diukur dengan menggunakan skala 4 poin yaitu Wajar

Tanpa Pengecualian=4, Wajar Dengan Pengecualian=3, Tidak Wajar=2, Tidak Memberikan Pendapat=1 (Endri dan Puji, 2017).

Definisi operasional dan pengukuran variabel dapat diiktisarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

No.	Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur
1	Kinerja Keuangan	Tingkatan pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan (Indah, 2016).	$Rasio\ efisiensi = \frac{Total\ Realisasi\ Pen}{Total\ Realisai\ Per}$ (Aziz, 2016)
2	Ukuran Pemerintah	Nominal yang dapat mendeskripsikan sesuatu, ukuran pemerintah menunjukkan besar kecilnya pemerintahan tersebut (Kusumawardani, 2012).	$Ukuran\ Pemerintah\ Daerah = \ln(Tot)$ (Indah, 2016)
3	Kemakmuran	Kemampuan dalam mencukupi kebutuhan (Riesty dan Made, 2016).	$Kemakmuran = \frac{PAD}{Total\ Pendapatan}$ (Hafidh dan Shiddiq, 2013)

4	<i>Intergovernmental revenue</i>	Untuk membantu daerah dalam mendanai pembangunan dan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Minarsih, 2015).	$\text{Intergovernmental Revenue} = \frac{\text{Total}}{\text{To}}$ (Aziz, 2016)
5	Belanja Modal	Pengeluaran pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan selama lebih dari satu tahun anggaran serta menambah kekayaan atau aset daerah (Ni Made dan Eka, 2016)	$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daer}}$ (Ni Made dan Eka, 2016)
6	Temuan Audit	Kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Hafidh dan Shiddiq,	Skala 3 poin yaitu jika nilai rata-rata temuan kasus banyak maka nilai 1, jika nilai rata-rata temuan kasus sedang maka nilai 2, jika nilai rata-rata temuan kasus sedikit maka nilai 3 (Putu dan Ni Made, 2016).

		2013)	
7	Opini Audit	Opini audit adalah pemeriksaan dengan memberikan kesimpulan atas tujuan pemeriksaan, khusus pemeriksaan keuangan, pemeriksa menyatakan kesimpulan dalam bentuk opini. (Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017)	Wajar Tanpa Pengecualian=4, Wajar Dengan Pengecualian=3, Tidak Wajar=2, Tidak Memberikan Pendapat=1 (Endri dan Puji, 2017)

### 3.6 Teknik Analisis

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan alat statistik sebagai berikut:

#### 3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh deskripsi terkait dengan data yang digunakan dalam penelitian dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi (*deviation standar*), varian (*variance*), median, nilai minimum, nilai maksimum, range, dan sebagainya (Ghozali, 2018:19). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah, kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Serta ukuran pemerintah, kemakmuran,

*intergovernment revenue*, belanja modal, opini audit, dan temuan audit sebagai variabel independen.

### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu. Uji Asumsi klasik adalah syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS (*ordinary least square*) agar model tersebut valid sebagai alat ukur. Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari gejala heterokedastisitas, gejala multikolinearitas, dan gejala autokorelasi. Model dapat dijadikan alat estimasi jika telah memenuhi persyaratan BLUE (*best linear unbiased estimator*). Ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi, diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas.

#### 3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji data variabel bebas dan data variabel terikat pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak normal (Danang Sunyoto, 2016:92). Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal. Pengujian normalitas data menggunakan *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov* dan juga dengan grafik *Normal Probability Plot*. Untuk uji *Kolmogorov-Smirnov*, pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Jika hasil signifikansi menunjukkan nilai signifikan  $> 0,05$  maka data residual terdistribusi dengan normal.

2. Jika hasil signifikansi menunjukkan nilai signifikan  $< 0,05$  maka data residual tidak terdistribusi dengan normal.

Untuk melihat apakah data berdistribusi normal dengan grafik *Normal Probability Plot* dapat dilakukan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila data yang berupa titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.
2. Data dapat dikatakan tidak berdistribusi normal apabila data menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti arah garis diagonal.

#### 3.6.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas adalah uji asumsi klasik yang ditetapkan untuk menganalisis regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas di mana akan di ukur keeratan hubungan antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (Danang Sunyoto, 2016:87). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara independen. Jika variabel independen saling korelasi, maka variabel ini tidak *orthogonal*, artinya variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel sama dengan nol. Untuk melihat apakah terjadi multikorelitas dalam model dapat dilihat dari *tolerance* dan *Variance Infaltion Factors* (VIF) dengan alat bantu berupa program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Deteksi multikorelitas dapat dilihat jika nilai *Variance Infaltion Factors* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1, maka model tersebut bisa dikatakan bebas dari multikolinieritas.

### 3.6.2.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode- $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya) (Ghozali, 2018:110). Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin Watson* dengan cara membandingkan nilai *Durbin Watson* hitung ( $d$ ) dengan nilai *Durbin Watson Table*, yaitu batas atas ( $d_U$ ) dan batas bawah ( $d_L$ ). Kriteria yang digunakan untuk menjadi patokan adalah sebagai berikut:

1. Bila  $d < d_L$ , maka ada korelasi yang positif.
2. Bila  $d_L \leq d \leq d_U$ , maka tidak dapat diambil kesimpulan.
3. Bila  $d_U \leq d \leq 4 - d_U$ , maka ada korelasi yang positif maupun negative.
4. Bila  $4 - d_U \leq d \leq -d_L$ , maka tidak dapat diambil kesimpulan.
5. Bila  $d > 4 - d_L$ , maka ada korelasi negative.

### 3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Persamaan regresi berganda perlu diuji mengenai sama atau tidak varian dari residual antar observasi satu dengan yang lainnya (Danang Sunyoto, 2016:90). Jika residualnya mempunyai varian yang sama maka disebut Homoskedastisitas dan jika variannya tidak sama maka disebut Heteroskedastisitas. Sebuah model regresi yang baik adalah model yang memiliki data yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heterikedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi heterokedastisitas, yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara  $ZPRED$  dan  $SRESID$  dimana sumbu  $Y$

adalah  $Y$  yang telah diprediksi, dan sumbu  $X$  adalah residual ( $Y$  prediksi –  $Y$  sesungguhnya) yang telah distudentized (Ghozali, 2018:139). Homoskedastisitas terjadi jika pada *stterplot* titik-titik hasil pengolahan data antara  $ZPRED$  dan  $SRESID$  menyebar dibawah maupun diatas titik orgin (0) pada sumbu  $Y$  dan tidak mempunyai pola yang teratur. Dasar pengambilan keputusan untuk uji statistik dengan menggunakan uji Glejser. Uji Glejser dengan tingkat signifikan diatas 5% maka disimpulkan tidak terjadi heterokendastisitas. Namun jika tingkat signifikan dibawah 5%, maka ada gejala heterokendastisitas.

### **3.7 Pengujian Model Regresi**

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan layak (*fit*) untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelian. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS.

#### **3.7.1 Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti meramalkan keadaan variabel dependen, bila kedua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2 (Sugiyono, 2017:275). Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda, yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah, kemakmuran, *intergovernmental*

revenue, belanja modal, opini audit, dan temuan audit. Hubungan antar variabel dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{SIZE} + \beta_2 \text{WEALTH} + \beta_3 \text{IR} + \beta_4 \text{BM} + \beta_5 \text{OPINI} + \beta_6 \text{TEMUAN} + \varepsilon$$

Y	: Kinerja keuangan
$\alpha$	: Konstan
$\beta$	: Koefisien regresi variabel independen
SIZE	: Ukuran pemerintah daerah
WEALTH	: Kemakmuran (wealth)
IR	: <i>Intergovernmental revenue</i>
BM	: Belanja Modal
OPINI	: Opini audit
Temuan	: Temuan audit
$\varepsilon$	: Koefisien error

### 3.8 Pengujian Hipotesis

#### 3.8.1 Uji Signifikan Simultan (Uji statistik F)

Uji F menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Pengujian dilakukan dengan menggunakan:

1. Menentukan hipotesis statistika

$H_0 : \beta_i = 0$ , artinya variabel bebas bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat.

$H_a : \beta_i \neq 0$ , artinya variabel bebas merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat.

2. Menentukan tingkat signifikansi yaitu  $\alpha = 1\%$ ,  $5\%$ ,  $10\%$  yaitu dengan:

$$df = n - k$$

Dimana:

Df = *degree of freedom* / derajat kebebasan

n = Jumlah sampel

k = Banyaknya koefisien regresi + konstanta

3. Menentukan pemeriksaan keputusan
  - a. Apabila tingkat signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya tidak ada pengaruh terhadap variabel bebas dengan variabel terikat.
  - b. Apabila tingkat signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.

### 3.8.2 Analisis Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2018:97). Nilai koefisien determinasi adalah yang memiliki nilai antara 0 sampai dengan 1. Nilai koefisien yang mendekati 1 artinya variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

### 3.8.3 Uji signifikansi t (Uji Parsial)

Uji beda t-test digunakan untuk menguji berapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan didalam penelitian secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial (Ghozali, 2018:98). Dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis statistika

$H_0 : \beta_i = 0$ , artinya tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

$H_a : \beta_i \neq 0$ , artinya ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

2. Menentukan tingkat signifikansi  $\alpha = 1\%, 5\%, 10\%$  yaitu dengan:

$$df_n = df_1 = k - 1$$

dimana:

$df$  = *degree of freedom*/derajat kebebasan

$n$  = jumlah sampel

$k$  = banyaknya koefisien regresi

3. Menentukan pemeriksaan keputusan

- a. Apabila tingkat signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

- b. Apabila tingkat signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berhubungan dengan ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel independen yaitu ukuran pemerintah, kemakmuran, *intergovernmental revenue*, dan belanja modal terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Deskripsi Sampel

Penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan sampel. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2017 sebanyak 105 sample. Berikut adalah perincian pengambilan sampel penelitian:

**Tabel 4.1**  
**Sampel Penelitian**

Kriteria Sampel	Jumlah
Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah	35
Pemerintah Daerah Tidak Memiliki Data Lengkap	0
Pemerintah Daerah Tidak Memiliki Laporan Pemeriksaan BPK	0
Jumlah Sampel yang Memenuhi Kriteria	35

Sumber: Data Sekunder diolah 2020

Kriteria pengambilan sampel adalah pemerintah daerah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah sebanyak 35. Pemerintah daerah yang tidak memiliki data lengkap sebanyak 0 dan pemerintah daerah yang tidak memiliki laporan hasil pemeriksaan BPK adalah 0. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria adalah

sebanyak 35 Kabupaten/Kota. Maka total sampel yang dalam 3 tahun pengamatan 2015-2017 adalah sebanyak 105.

## 4.2 Analisis Data

### 4.2.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh deskripsi terkait dengan data yang digunakan dalam penelitian dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi (*deviation standar*), varian (*variance*), median, nilai minimum, nilai maksimum, range, dan sebagainya (Ghozali, 2018:19). Hasil uji statistik deskriptif secara lebih rinci dapat dilihat dalam tabel 4.2 berikut :

**Tabel 4.2**  
**Statistics Deskriptive**

	SIZE	KM	BM	IR	TMN	OPN	KINERJA
N Valid	105	105	105	105	105	105	105
Missing	0	0	0	0	0	0	0
Mean	28.76677	.15364	.18471	.61312	2.07	3.78	.99960
Median	28.67100	.14000	.17800	.61400	2.00	4.00	.99600
Mode	28.409 <sup>a</sup>	.142	.154	.584 <sup>a</sup>	3	4	.956 <sup>a</sup>
Std. Deviation	.568957	.056942	.048827	.063949	.880	.416	.052554
Minimum	25.878	.079	.043	.360	0	3	.860
Maximum	31.034	.382	.316	.722	3	4	1.145

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan table 4.2 di atas diketahui bahwa variabel ukuran pemerintah dengan nilai tertinggi sebesar 31,034 dimiliki oleh pemerintah Kota Semarang, sedangkan nilai terendah sebesar 25,878 dimiliki oleh Kabupaten Purworejo dengan rata-rata sebesar 28,76677 dengan standar deviasi sebesar 0,568957. Dengan demikian maka nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya, hal ini menunjukkan rendahnya variabilitas antara nilai minimum dan nilai maksimum. Variabilitas data yang rendah dapat dikatakan penyebaran data

normal. Selain itu, variabel ukuran pemerintahan memiliki tingkat akurasi yang baik karena nilai rata-rata 28,766 lebih besar dari nilai tengahnya sebesar 28,671.

Variabel kemakmuran dengan nilai tertinggi sebesar 0,382 dimiliki oleh Kota Semarang, sedangkan Kabupaten Banjarnegara memiliki nilai terendah sebesar 0,079, dengan rata-rata 0,15364 dengan standar deviasi sebesar 0,056942. Dengan demikian maka nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya, hal ini menunjukkan rendahnya variabilitas antara nilai minimum dan nilai maksimum. Variabilitas data yang rendah dapat dikatakan penyebaran data normal. Selain itu, variabel kemakmuran memiliki tingkat akurasi yang baik karena nilai rata-rata 0,1536 lebih tinggi dibandingkan nilai median sebesar 0,1400.

Variabel *Intergovernmental Revenue* tertinggi dimiliki oleh kabupaten Wonogiri sebesar 0,722, sedangkan *Intergovernmental revenue* terendah dimiliki oleh Kota Semarang sebesar 0,360. Memiliki rata-rata sebesar 0,6131 dengan standar deviasi sebesar 0,063949. Dengan demikian maka nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya, hal ini menunjukkan rendahnya variabilitas antara nilai minimum dan nilai maksimum. Variabilitas data yang rendah dapat dikatakan penyebaran data normal. Selain itu, variabel kemakmuran memiliki tingkat akurasi yang baik karena nilai rata-rata 0,6131 lebih tinggi dibandingkan nilai median sebesar 0,1640.

Variabel belanja modal tertinggi sebesar 0,316 dimiliki oleh Kabupaten Kudus. Pemerintah daerah dengan belanja modal terendah dimiliki oleh Kabupaten Rembang sebesar 0,043. Memiliki rata-rata sebesar 0,18471 dengan

standar deviasi 0,048827. Dengan demikian maka nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya, hal ini menunjukkan rendahnya variabilitas antara nilai minimum dan nilai maksimum. Variabilitas data yang rendah dapat dikatakan penyebaran data normal. Selain itu, variabel kemakmuran memiliki tingkat akurasi yang baik karena nilai rata-rata 0,1847 lebih besar dibandingkan nilai tengah sebesar 0,1780.

Variabel temuan audit terbesar berjumlah 3 temuan dan jumlah terendah dengan tidak ada temuan terdapat di kabupaten Banyumas, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Kebumen. Dengan nilai modus sebesar 3, hal ini menunjukkan rendahnya variabilitas antara nilai minimum dengan nilai maksimum. Variabilitas data yang rendah dapat dikatakan penyebaran data normal. Selain itu, variabel ukuran pemerintahan memiliki tingkat akurasi yang baik karena nilai rata-rata 2,07 lebih besar dari nilai tengahnya sebesar 2,00.

Variabel opini audit BPK dengan nilai tertinggi yaitu 4 dan nilai terendah 3, dan memiliki nilai modus sebesar 4, hal ini menunjukkan rendahnya variabilitas antara nilai minimum dan nilai maksimum. Variabilitas data yang rendah dapat dikatakan penyebaran data normal. Selain itu, variabel ukuran pemerintahan memiliki tingkat akurasi yang baik karena nilai rata-rata 3,78 lebih besar dari nilai tengahnya sebesar 4,00.

Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai maksimal sebesar 1,145 dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Brebes dan nilai minimum sebesar 0,860 dimiliki pemerintah Kabupaten Rembang. Memiliki rata-rata sebesar 0,99960, dengan standar deviasi

sebesar 0,52554. Dengan demikian maka nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya, hal ini menunjukkan rendahnya variabilitas antara nilai minimum dan nilai maksimum. Variablilitas data yang rendah dapat dikatakan penyebaran data normal. Selain itu, variabel ukuran pemerintahan memiliki tingkat akurasi yang baik karena nilai rata-rata 0,99960 lebih besar dari nilai tengahnya sebesar 0,99600.

### 4.3 Uji Asumsi Klasik

#### 4.3.1 Uji Normalitas

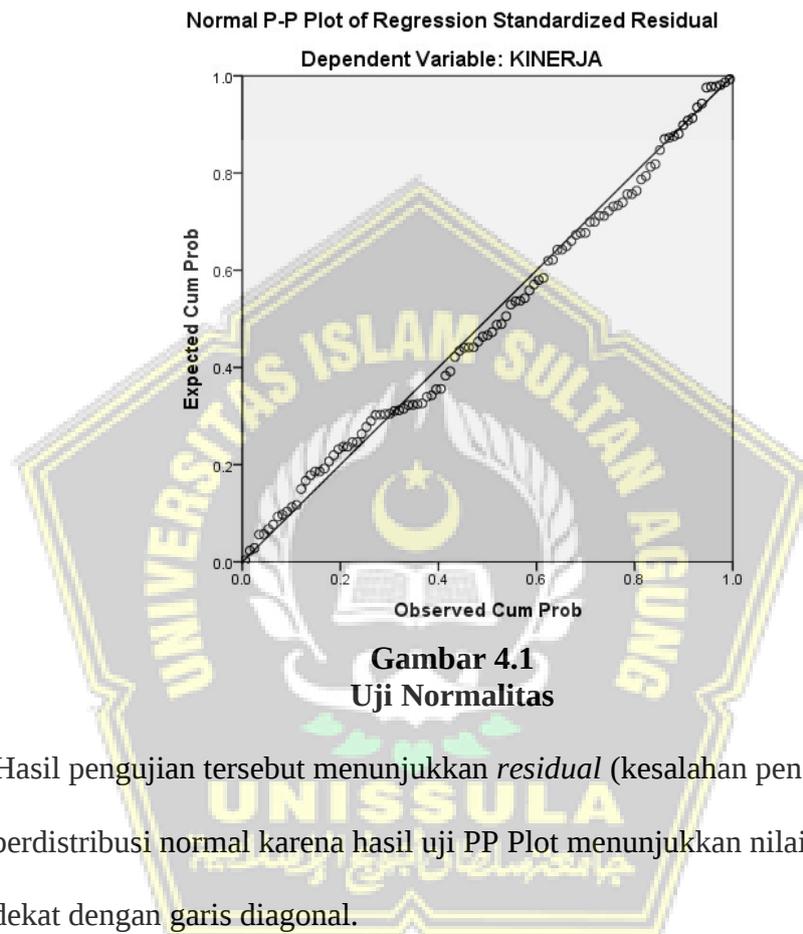
Uji normalitas data dilakukan dengan *Test of Normality Kolmogrov-Smirnov* yaitu dengan melihat hasil signifikansi, jika nilai signifikansi menunjukkan nilai signifikan  $> 5\%$  maka data berdistribusi normal Pengujian normalitas juga dapat dilakukan dengan melihat grafik *Normal Probability Plot* yaitu dengan melihat jika titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka data dapat dikatakan normal. Hasil pengujian dengan uji *Kolmogrov Smirnov* dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.

**Tabel 4.3**  
**Uji normalitas**

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04236253
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.058
	Positive	.058
	Negative	-.038
Test Statistic		.058
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan uji normalitas yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi  $0,200 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.



#### 4.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antara variabel bebas. Uji multikolinieritas dilakukan dengan cara melihat *tolerance* dan *Variance Inflation Factors (VIF)*, dengan melihat jika nilai *VIF* tidak lebih besar dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan

bebas multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4  
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
SIZE	.689	1.452	Non multikolinieritas
KM	.583	1.715	Non multikolinieritas
IR	.638	1.567	Non multikolinieritas
BM	.804	1.243	Non multikolinieritas
TMN	.945	1.058	Non multikolinieritas
OPN	.858	1.165	Non multikolinieritas

Sumber: data sekunder diolah, 2020

Hasil perhitungan variabel ukuran pemerintah daerah menunjukkan nilai *tolerance* 0,689 tidak kurang dari 0,10 dan hasil perhitungan nilai *VIF* menunjukkan 1,452 berada dibawah angka 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas antar variabel independen dengan model regresi.

Hasil perhitungan variabel kemakmuran menunjukkan nilai *tolerance* 0,583 tidak kurang dari 0,10 dan hasil perhitungan nilai *VIF* menunjukkan 1,715 berada dibawah angka 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas antar variabel independen dengan model regresi.

Hasil perhitungan variabel *intergovernmental revenue* menunjukkan nilai *tolerance* 0,638 tidak kurang dari 0,10 dan hasil perhitungan nilai *VIF* menunjukkan 1,567 berada dibawah angka 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas antar variabel independen dengan model regresi.

Hasil perhitungan variabel belanja modal menunjukkan nilai *tolerance* 0,804 tidak kurang dari 0,10 dan hasil perhitungan nilai *VIF* menunjukkan 1,243 berada dibawah angka 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolineritas antar variabel independen dengan model regresi.

Hasil perhitungan variabel temuan audit menunjukkan nilai *tolerance* 0,945 tidak kurang dari 0,10 dan hasil perhitungan nilai *VIF* menunjukkan 1,058 berada dibawah angka 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolineritas antar variabel independen dengan model regresi.

Hasil perhitungan variabel opini audit menunjukkan nilai *tolerance* 0,858 tidak kurang dari 0,10 dan hasil perhitungan nilai *VIF* menunjukkan 1,165 berada dibawah angka 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolineritas antar variabel independen dengan model regresi.

#### 4.3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin Watson*. Jumlah variabel independen adalah 6 variabel dengan total sampel sebanyak 105. Dengan demikian maka  $k = 6$  dan  $n = 105$ , nilai  $d_l = 1,5634$  dan  $4-d_l = 2,4366$ , dan nilai  $d_u = 1,804$  dan nilai  $4-d_u = 2,196$ .

Hasil perhitungan dengan SPSS diperoleh nilai *Durbin Watson* dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut.

**Tabel 4.5**  
**Uji Autokorelasi *Durbin Watson***

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.592 <sup>a</sup>	.350	.310	.043640	1.864

Sumber: Data Sekunder diolah 2020

Tabel 4.5 menunjukkan nilai uji *Durbin Watson* pada model persamaan regresi berada pada daerah  $du < d < 4-du$  ( $1,804 < 1,864 < 2,196$ ). Dengan demikian tidak terdapat autokorelasi.

#### 4.3.4 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas didalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *glejser*. Uji *glejser* dengan signifikansi diatas 5% maka tidak terjadi heterokedastisitas dan jika nilai signifikansi dibawah 5% maka terjadi heterokedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.114	.158		.718	.475
SIZE	-.002	.005	-.036	-.298	.766
KM	-.031	.059	-.069	-.530	.597
IR	-.034	.050	-.083	-.670	.505
BM	.081	.058	.153	1.385	.169
TMN	.002	.003	.074	.724	.471
OPN	-.007	.007	-.118	-1.106	.271

Sumber: data sekunder diolah, 2020

Hasil uji heterokedastisitas pada tabel menunjukkan bahwa data variabel ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini tidak mengalami heterokedastisitas. Hal ini ditunjukkan pada tabel bahwa probabilitas (*sig.*) 0,766 > 0,05. Variabel kemakmuran menunjukkan bahwa probabilitas (*sig.*) 0,597 > 0,05 yang artinya tidak mengalami heterokedastisitas. Variabel *intergovernmental revenue* menunjukkan probabilitas (*sig.*) 0,638 > 0,05 yang artinya tidak

mengalami heterokedastisitas. Belanja modal menunjukkan probabilitas (*sig.*) 0,804 > 0,05 yang artinya tidak mengalami heterokedastisitas. Opini audit menunjukkan probabilitas (*sig.*) 0,858 yang artinya tidak mengalami heterokedastisitas. Temuan audit menunjukkan probabilitas (*sig.*) 0,945 yang artinya tidak mengalami heterokedastisitas.

Kesimpulan hasil uji heterokedastisitas pada tabel menunjukkan bahwa data variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami heterokedastisitas. Hal ini ditunjukkan pada tabel bahwa probabilitas (*sig.*) dalam tiap model regresi >0,05.

#### 4.4 Pengujian model regresi

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan layak untuk melakukan pengujian hipotesis. Perhitungan statistic dalam analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan program computer *SPSS for Windows* versi 23.0. Hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS ada pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
	B	Std. Error	Beta	
1 (Constant)	.993	.265		.000
SIZE	-.008	.009	-.086	.385
KM	-.063	.098	-.068	.523
IR	.163	.084	.199	.054
BM	.588	.098	.546	.000

TMN	.003	.005	.053	.530
OPN	.008	.011	.060	.494

Sumber: data diolah, 2020

Model persamaan regresi yang dapat dituliskan dari hasil tersebut dalam bentuk persamaan regresi bentuk standard adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,993 - 0,008(\text{size}) - 0,063(\text{KM}) + 0,163(\text{IR}) + 0,558(\text{BM}) + 0,003(\text{TMN}) + 0,008(\text{OPN}) + \varepsilon$$

#### 4.5 Uji Hipotesis

##### 4.5.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji signifikan simultan (uji statistik F) dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksud dalam model memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Hasil uji statistik F penelitian ini ditunjukkan melalui tabel 4.8 berikut.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji F**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.101	6	.017	8.804	.000 <sup>b</sup>
Residual	.187	98	.002		
Total	.287	104			

Sumber: data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan tabel uji F dapat dilihat nilai F hitung adalah sebesar 8,804 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi tersebut <0,05 yang artinya hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa model regresi layak untuk digunakan. Variabel independen yaitu ukuran pemerintah, kemakmuran, belanja modal,

*intergovernmental revenue*, temuan audit, dan opini audit secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### 4.5.2 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat.

**Tabel 4.9**  
**Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.592 <sup>a</sup>	.350	.310	.043640

Sumber: data sekunder diolah, 2

Hasil hitung regresi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi ( $R^2$ ) diperoleh sebesar 0,310. Hal ini berarti 31,0% Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh ukuran pemerintahan, kemakmuran, belanja modal, *intergovernmental revenue*, opini audit dan temuan audit dan sedangkan sisanya 69% kinerja keuangan daerah dipengaruhi oleh variabel lain.

#### 4.5.3 Uji Signifikansi t (uji Parsial)

Uji beda t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. Hasil pengujian hipotesis dengan uji signifikansi t (uji parsial) dapat dilihat dalam tabel 4.10 berikut.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji t**

Variabel	Koefisien Regresi	T	Sig	Kesimpulan
Konstanta	0,993	3.750	0,000	
Size	-0,008	-.873	0,385	Negatif tidak signifikan.

				Hipotesis ditolak
<b>KM</b>	-0,063	-.641	0,523	Negatif tidak signifikan. Hipotesis diterima
<b>IR</b>	0,163	1.949	0,054	Positif tidak signifikan. Hipotesis ditolak
<b>BM</b>	0,588	6.013	0,000	Positif signifikan. Hipotesis diterima
<b>TMN</b>	0,003	.630	0,530	Positif tidak signifikan. Hipotesis diterima
<b>OPN</b>	0,008	.684	0,496	Positif tidak signifikan. Hipotesis ditolak

Sumber: Data sekunder diolah 2020

Pengujian hipotesis atas hasil regresi adalah sebagai berikut:

a. Hipotesis Pertama

Uji hipotesis pertama dilakukan untuk mendapatkan bukti terkait dengan adanya pengaruh ukuran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menunjukkan nilai t hitung  $(-0,873) < t$  tabel  $(1,98397)$  dengan nilai koefisien regresi  $-0,008$  dengan nilai signifikansi  $0,385$  ( $\text{sig} > 0,05$ ) maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya variabel ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil dari uji t dapat dijelaskan jika variabel ukuran pemerintahan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun hasil tersebut tidak didukung secara empiris, karena nilai signifikansinya berada jauh diatas 5%. Maka dengan demikian hipotesis pertama ditolak.

b. Hipotesis kedua

Uji hipotesis kedua dilakukan untuk memperoleh bukti terkait adanya pengaruh antar tingkat kemakmuran terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah. Penelitian ini menunjukkan nilai  $t$  hitung  $(-0,641) < t$  tabel  $(1,98397)$  dengan nilai koefisien regresi  $-0,063$  dengan nilai signifikansi  $0,523$  ( $\text{sig} > 0,05$ ) maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya variabel kemakmuran tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil dari uji  $t$  dapat dijelaskan jika variabel kemakmuran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun hasil tersebut tidak terdukung secara empiris, karena nilai signifikansinya berada jauh diatas 5%. Dengan demikian hipotesis kedua ditolak.

c. Hipotesis Ketiga

Uji hipotesis ketiga dilakukan untuk memperoleh bukti terkatinya adanya hubungan antara *intergovernmental revenue* dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menunjukkan nilai  $t$  hitung  $(1,949) > t$  tabel  $(1,983)$  dengan nilai koefisien regresi  $0,163$  dan nilai signifikansi  $0,054$  ( $\text{sig} > 0,05$ ). Berdasarkan hasil dari persamaan regresi dapat dijelaskan bahwa variabel  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya variabel *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap variabel kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan dari hasil uji  $t$  maka *intergovernmental revenue* berpengaruh secara positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil tersebut didukung secara empiris, karena nilai signifikansinya yang berada di atas 5%. Dengan demikian hipotesis keempat ditolak.

d. Hipotesis Keempat

Uji hipotesis keempat dilakukan untuk memperoleh bukti empiris terkait adanya pengaruh antara Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menunjukkan nilai  $t$  hitung (6,013) >  $t$  tabel (1,983) dengan nilai koefisien regresi 0,588 dan nilai signifikansi 0,000 (sig<0,05), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya variabel belanja modal berpengaruh terhadap variabel kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil dari hasil uji  $t$  dapat dijelaskan bahwa variabel Belanja Modal berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil tersebut didukung secara empiris, karena nilai signifikansinya yang berada di bawah 5%. Dengan demikian hipotesis ketiga diterima.

e. Hipotesis Kelima

Uji hipotesis kelima dilakukan untuk memperoleh bukti terkait adanya hubungan antara temuan audit dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menunjukkan nilai  $t$  hitung (0,630) <  $t$  tabel (1,983) dengan koefisien regresi sebesar 0,003 dan nilai signifikansi 0,530 (sig>0,05), maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya variabel temuan audit tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil dari uji  $t$  dapat dijelaskan jika variabel temuan audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun hasil tersebut tidak terdukung secara empiris, karena nilai signifikansinya berada jauh diatas 5%. Dengan demikian hipotesis keenam ditolak.

f. Hipotesis Keenam

Uji hipotesis keenam dilakukan untuk memperoleh bukti terkait adanya hubungan antara opini audit dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menunjukkan nilai  $t$  hitung ( $0,684$ ) <  $t$  tabel ( $1,983$ ) dengan nilai koefisien regresi sebesar  $0,008$  dan nilai signifikansi  $0,496$  ( $\text{sig} > 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya variabel opini audit berpengaruh terhadap variabel kinerja pemerintah daerah.. Berdasarkan hasil dari uji  $t$  dapat dijelaskan jika variabel opini audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun hasil tersebut tidak terdukung secara empiris, karena nilai signifikansinya berada jauh diatas  $5\%$ . Dengan demikian hipotesis kelima ditolak.

#### **4.5 Pembahasan**

##### **1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerahs**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Rata-rata ukuran pemerintah daerah tingkat II di Jawa Tengah adalah sebesar  $28.76677$ , nilai minimal ukuran pemerintah daerah di Jawa Tengah adalah sebesar  $25.878$  dan nilai maksimal ukuran pemerintah daerah adalah sebesar  $31.034$ . Sebab semakin besar aset maka efiseiensiya semakin kecil Besarnya jumlah aset daerah dapat menyulitkan pemerintah untuk memonitor masing-masing aset yang dimiliki oleh daerahnya secara langsung. Dalam hal ini dapat memungkinkan terjadinya tindak penyalahgunaan pada aset tersebut yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nandhya dan Lulus (2013) dan Nur Ade dan Kiswanto (2016) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Putu dan Ni Made (2016), Indah Puspa Sari (2016), Azmaul Aziz (2016) dan Gita Mayora (2015) yang membuktikan bahwa ukuran pemerintahan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## **2. Pengaruh Kemakmuran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemakmuran suatu daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Besar rata-rata PAD pemerintah daerah dibagi total pendapatan selama tahun penelitian pemerintah daerah tingkat II sebesar 0,15, sedangkan mediannya adalah sebesar 0,14, nilai rata-rata mendekati nilai median dapat dikatakan tingkat kemakmuran di Jawa Tengah adalah sedang. Tingkat efisiensi pemerintah daerah adalah sebesar 0,99 menunjukkan bahwa tingkat efisiensi juga belum maksimal. Hasil ini menunjukkan bahwa peran PAD dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah belum dapat berfungsi dengan semestinya. Hal ini terbukti dengan masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nandhya Marfiana dan Lulus Kurniasih (2013) yang menyatakan bahwa kemakmuran daerah berpengaruh

negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun temuan ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Surepno (2013) yang menyatakan bahwa kemakmuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan penelitian Putu Resty dan Ni Made (2016), Ni Made dan Eka (2016), dan Gita Mayora (2015) yang menyatakan bahwa kemakmuran berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **3. Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan ketergantungan pada pemerintah pusat memiliki presentase yang masih tinggi. Rata-rata *intergovernmental revenue* adalah sebesar 0,613, sedangkan mediannya adalah 0,614 nilai rata-rata temuan audit mendekati nilai median dapat dikatakan jika temuan audit di Jawa Tengah adalah sedang. Dari hasil statistic deskriptif dapat dilihat nilai rata-rata hampir memiliki hasil yang sama pada tiap kategorinya. Hasil ini seharusnya bisa menjadikan suatu tekanan untuk pemerintah daerah bahwa dalam pelaksanaan pemerintah daerah akan selalu diawasi oleh pemerintah pusat sehingga mampu memberikan kinerja yang baik.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Putu dan Ni Made (2016), dan Ni Made dan Eka (2016) yang menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun

temuan ini tidak sejalan dengan Gita Mayora (2015), Asmaul Aziz (2016), Indah Puspita Sari (2016), Nandhya dan Lulus (2013), dan Nur Ade dan Kiswanto (2016) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### **4. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Besar rata-rata belanja modal selama tahun penelitian pemerintah daerah tingkat II sebesar 0,184, sedangkan mediannya adalah sebesar 0,178, nilai rata-rata mendekati nilai median dapat dikatakan tingkat belanja modal di Jawa Tengah adalah sedang. Belanja modal dapat memiliki pengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah yang berkaitan juga dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dapat meningkatkan pembangunan fasilitas umum yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat mengindikasikan jika anggaran belanja pemerintah daerah sudah direalisasikan dengan baik, yang dapat mengakibatkan belanja daerah memiliki pengaruh yang positif dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Asmaul Aziz (2016), Mulia, Hasan, dan M. Shabri (2016), Nandhya dan Lulus (2013), dan Nur ade dan Kiswanto (2016) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun temuan ini tidak sejalan dengan

penelitian yang dilakukan Ni Made dan Eka (2016) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan Ni Putu dan Ida (2018) yang menyatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### **5. Pengaruh Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Besar rata-rata temuan audit selama tahun penelitian adalah sebesar 2,07, sedangkan mediannya adalah 2, nilai rata-rata temuan audit mendekati nilai median dapat dikatakan jika temuan audit di Jawa Tengah adalah sedang. Tingkat efisiensi pemerintah daerah tingkat II di Jawa Tengah adalah sebesar 0,99 menunjukkan bahwa tingkat efisiensi juga belum maksimal. Hal ini menjelaskan mengapa temuan audit belum dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan audit memerlukan revisi namun pelaksanaan revisi hanya sebagai pemenuhan kewajiban tanpa adanya tindak lanjut dari pemerintah untuk melakukan kinerja yang lebih baik.

Temuan ini sejalan dengan temuan Nur Ade dan Kiswanto (2016) yang membuktikan bahwa temuan audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini tidak sejalan dengan temuan Putu dan Ni Made (2016), Endri dan Puji (2017), Nandhya dan Lulus (2013) yang

menyatakan bahwa temuan audit memiliki pengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### **6. Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Besar rata-rata opini audit selama tahun penelitian adalah sebesar 3,78. Sedangkan mediannya adalah 4, nilai rata-rata mendekati nilai median dapat dikatakan jika opini audit di Jawa Tengah wajar tanpa pengecualian. Efisiensi pemerintah daerah tingkat II di Jawa Tengah adalah sebesar 0,99 menunjukkan bahwa tingkat efisiensi juga belum maksimal. Hal ini menjelaskan mengapa opini audit belum dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Opini audit belum dapat menjelaskan keterkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini karena opini audit BPK merupakan hasil pemeriksaan laporan keuangan yang lebih menekankan pada kewajaran penyajian laporan keuangan dan tidak berfokus pada kinerja keuangan.

Temuan ini sejalan dengan Nandhya dan Lulus (2013) yang menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun temuan ini tidak sejalan dengan temuan Putu dan Ni Made (2016), Ni Made dan Eka (2016), Endri dan Puji (2017) yang menemukan bahwa opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan pada penelitian kali ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Besarnya jumlah aset daerah dapat menyulitkan pemerintah untuk memonitor masing-masing aset yang dimiliki oleh daerahnya secara langsung dan dapat menimbulkan penyalahgunaan pada aset tersebut, sehingga tidak dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Tingkat kemakmuran suatu daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa peran PAD dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah belum dapat berfungsi dengan semestinya. Hal ini terbukti dengan masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.
3. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa dana alokasi umum yang berasal dari pemerintah pusat dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten atau kota belum dapat berfungsi dengan baik dan semestinya.

4. Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.
5. Temuan audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan audit memerlukan revisi namun pelaksanaan revisi hanya sebagai pemenuhan kewajiban tanpa adanya tindak lanjut dari pemerintah untuk melakukan kinerja yang lebih baik.
6. Opini audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini karena opini audit BPK merupakan hasil pemeriksaan laporan keuangan yang lebih menekankan pada kewajaran penyajian laporan keuangan dan tidak berfokus pada kinerja keuangan.

## 5.2 Keterbatasan

1. Pada penelitian ini, variabel bebas (ukuran pemerintahan, kemakmuran, *intergovernmental revenue*, belanja modal, temuan audit, dan opini audit) hanya dapat menjelaskan variabel terikat (Kinerja Pemerintah Daerah) sebesar 31,0%, Artinya 69% kinerja keuangan daerah tidak terdapat pada penelitian ini
2. Instrument dalam pengukuran variabel penelitian ini menggunakan instrument yang diadopsi dari penelitian yang sebelumnya, sehingga kemungkinan terdapat kelemahan dalam menterjemahkan instrument yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan arti atau kemungkinan peneliti salah dalam mempersepsikan maksud yang sebenarnya.

### 5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang diberikan antara lain:

#### 1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah tingkat II sebaiknya memaksimalkan belanja modal dan *intergovernmental revenue* karena terbukti dapat meningkatkan kinerja, namun disamping itu pemerintah daerah juga perlu melakukan efisiensi dalam penggunaan aset agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah. Temuan audit BPK sebaiknya disikapi secara positif sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah pada masyarakat sehingga pemerintah daerah akan melakukan tindak lanjut yang optimal atas temuan-temuan tersebut dalam upaya peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### 2. Bagi Akademisi

Dilihat dari nilai *adjusted R square* sebesar 31,0% yang berarti masih terdapat variabel independen lain diluar penelitian ini yang secara signifikan berpengaruh terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah. Jadi, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel tersebut diantaranya adalah ukuran legislative. Ukuran legislative diprediksi dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah karena semakin besar jumlah legislative diharapkan dapat melakukan pengawasan yang dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmaul, A. 2016, “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. *E-Jurnal STIE DEWANTARA*. 9 No.1. 1907-7513
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Endri, P., dan Puji, H. 2017. “Pengaruh Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. *E-Jurnal Universitas Diponegoro*. Vol.6. No.1 1-9
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gita, M. 2015, “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”. *Jom FEKON*. Vol.2 No.2
- Hafidh, S. S., dan Shiddiq, N. R. 2013. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”. *E-Jurnal Universitas Diponegoro*. Vol.2. No. 4 1-13
- Havid, S., dan Yanuar. E. R. 2011. “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah”. *Media Riset Akuntansi*. Vol. 1 No. 2
- Jensen, M., dan W. Mackling. 1976. “*Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure*”. *Jurnal of Financial Economics*. Pp:305-306.
- Indah, P. S. 2016. “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan, dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. *JOM Fekon*. Vol.3. No.1

Indriantoro, N., dan Supomo, B. 2016. ***Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen, (Edisi Pertama)***. Yogyakarta: BPF

Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online. ***Pengertian Kemakmuran***.

Kusumawardani, M. 2012. “Pengaruh *Size*, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”. ***Accounting Analysis Journal Universitas Negeri Semarang***. 1(1):27:35

Meisser, et al. 2006. ***Auditing & Assurance Service A Systematic Approach***. Buku II, Edisi ke 4. Jakarta: Salemba Empat

Minarsih, R. A. 2015. “Pengaruh *Size*, *Wealth*, *Leverage* dan *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah”. **Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang**

Mohammed, et al. 2015. “*Expenditure and Internally Generated Revenue Relationship: An Analysis of Local Governments in Adamawa State, Nigeria*”. ***Jurnal of Arts, Science & Commerce***. Vol 15 No. 3 67-77

Mulia, A., Hasan, B., dan M.Sabri, A. M. 2016. “Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh”. ***Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala***. Vol. 5. pp.30-38

Nandhya, M., dan Lulus, K. 2013. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. ***Universitas Sebelas Maret***

Nazaruddin, I., dan Basuki, A. T. 2015. ***Analisis Statistik dengan SPSS***. Yogyakarta: Danisa Media

Ni Made, S., dan Eka, A. S. 2016. “Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. ***E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana***. Vol.15.2 1453-1481

Ni Putu, G. S. A., dan Ida, B. P. S. 2018. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*. Vol.7. No.2 108-1110

Nur, A. N., dan Kiswanto. 2016. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. *Accounting Analysis Journal* 5 (10)

Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah Pemerintah Dalam Negeri No.33 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018

Putu, R. M., dan Ni Made, A. E. 2016, “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, *Intergovernmental Revenue*, Temuan dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan”. *E-Jurnal Universitas Udayana*. 14 No.2. 1150-1182

Setyowati, Lilis. 2016. “Determinan yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*”. 6 No. 1

Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV

Suhardjanto, et al. 2010. *Influence of Parliament Characteristics toward Mandatory Accounting Disclosure Compliance in Indonesia*. Hibah Penelitian

Sularso, havid dan Yanuar E. Restianto. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Moadl dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. *Media Riset Akuntansi*, Vol 1. No. 2 Agustus 2011

Sumarjo, H. 2010. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia”. **Skripsi. Universitas Sebelas Maret**

Sunyoto, D. 2016. *Metode Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT. Refika Aditama

Surepno. 2013. “Pengaruh Return on Equity (ROE), Ukuran (Size), dan Kemakmuran (Wealth) Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”. *Skripsi. Universitas Negeri Semarang*

Syafitri, F. 2012. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan”. *Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*

Undang-Undang No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Yulia, A. D. N., dan Mimba. N. P. S. H. 2016. “Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*